**PENGARUH PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL* *RESPONSIBILITY* DAN *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK PADA INDUSTRI PERTANIAN DI BURSA EFEK INDONESIA 2016-2018**

Rambio Hasiholan Manalu

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Mercu Buana Yogyakarta

E-mail: rambiomanalu99@gmail.com

Rochmad Bayu Utomo, S.E., M.Si., Ak., CA

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Mercu Buana Yogyakarta

E-mail: bayu@mercubuana-yogya.ac.id

***ABSTRACT***

 *The aim of this research is to obtain evidence of the influence of corporate social responsibility (CSR), good corporate governance (GCG), to tax aggressiveness. The sample that used in this research are agriculture industry in Indonesia Stock Exchange (BEI) for period 2016-2018.This research employs 42 samples. The selecting method for this research use purposive sampling method. Dependent variable of this study is tax aggressivity which proxied by Effective Tax Rate (ETR). Independent variables of this study are CSR, independent board of commissioners, board of directors, audit committe.. The data in this research was processed using software SPSS 24 with descriptive statistics,multiple regression analysis method, classical assumption, hypothesis test. The result of this research indicates that CSR have negative significant effect for tax aggressiveness, while independent board of commissioners have significant effect for tax aggressiveness, board of directors have significant effect for tax aggressiveness, audit committee have negative significant effect for banking tax aggressiveness.*

**Keywords**: Tax Agressiveness, CSR, *independent board of commissioners, board of directors, audit committe*

**PENDAHULUAN**

Pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua Pengeluaran,.termasuk pengeluaran pembangunan. Sumber pendapatan pajak di Indonesia berasal,,dari dua wajib pajak, wajib pajak baik orang pribadi maupun wajib,; pajak badan. Ketentuan mengenai perpajakan di Indonesia diatur dalam Pasal 23A UUD 1945 yang berbunyi: “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang” (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2013). Pemerintah menggunakan pendapatan dari sektor pajak ini untuk membiayai semua pengeluaran negara, termasuk pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Indonesia melakukan berbagai kebijakan untuk peningkatan pendapatan dari sektor perpajakan karena penerimaan pajak berpengaruh signifikan dalam besarnya anggaran APBD. Hal ini didukung oleh data dari Direktorat Jendral Pajak berupa target dan realisasi Penerimaan Pajak dari tahun 2016-2018 yang disajikan pada tabel 1.1.

Tabel 1.1

Penerimaan Pajak tahun 2016-2018

|  |
| --- |
| Tahun 2016 2017 2018 |
| Target 1.355,20 1.283,57 1.424,00Realisasi 1.105,73 1.151,03 1.315,51Capaian 81,59 % 89,67 % 92,24 % |

*Sumber:* [*www.pajak.go.id*](http://www.pajak.go.id) *2018*

Berdasarkan data direktorat jenderal pajak pada Tabel 1.1 besarnya realisasi penerimaan Negara dari sektor pajak pada tahun 2016 adalah sebesar 1.105,73 triliun Rupiah dari jumlah penerimaan yan ditargetkan yaitu 1.355,20 Triliun Rupiah. Dengan penerimaan pajak sebesar itu maka capaian penerimaan pajak 81,59% dari jumlah target. Tahun 2017 penerimaan pajaknya sebesar 1.151,03 Triliun Rupiah dari jumlah penerimaan yang ditargetkan yaitu 1.283,57 TriliunRupiah. Dengan penerimaan pajak sebesar itu capaian penerimaan pajaknya adalah sebesar 89,67% dari jumlah target. Tahun 2018 pencapaian realisasi penerimaan pajaknya adalah sebesar 1.315 Triliun Rupiah dari jumlah penerimaan yang ditargetkan yaitu 1.424,00 Triliun Rupiah. Dengan penerimaan pajak sebesar itu maka capain penerimaan pajaknya adalah sebesar 92,24% dari jumlah target yang ingin dicapai.

Agresivitas pajak muncul karena adanya perbedaan kepentingan antara perusahaan dan pemerintah. Pemerintah berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan pada sektor pajak agar dapat membiayai seluruh penyelenggaraan negara. Beda halnya dengan perusahaan yang berupaya untuk memaksimalkan laba namun meminimalisir beban pajak yang harus dibayarkan, karena perusahaan menganggap pajak dapat mengurangi laba bersih perusahaan. Perbedaan kepentingan antara perusahaan dan pemerintah inilah yang membuat wajib pajak mengefisienkan beban pajaknya melalui tindakan agresivitas pajak baik secara legal maupun ilegal, sehingga perusahaan dapat memperoleh keuntungan yang besar (Darmawan dan Sukartha, 2014).

Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak 2018 dari empat sektor utama tumbuh lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Sektor yang dimaksud yakni industri pengolahan, perdagangan, konstruksi dan real estat, serta pertanian. Hal ini didukung oleh data dari Direktorat Jendral Pajak berupa Penerimaan Pajak tahun 2018 yang disajikan pada gambar 1.1.



*Sumber:* [*www.pajak.go.id*](http://www.pajak.go.id) *2018*

Gambar 1.1

Sektor usaha penerimaan pajak tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas bahwa sektor industri Pertanian berada diposisi terendah untuk penerimaan pajak pada tahun 2018 sebesar 18,66 Triliun dengan Tax rasio 1,8 % peneliti tertarik akan hal ini apakah sektor industri pertanian melakukan agresivitas pajak sehingga pembayaran pajak kenegara rendah

**KAJIAN PUSTAKA**

**Teori Agensi (*Agency Theory*)**

*Agency Theory* atau teori keagenan/ mendasari praktek pengungkapan laporan, tahunan oleh perusahaan terhadap. para pemegang saham. Teori keagenen Jensen and Meckling (1976) memiliki asumsi bahwa para pemegang saham tidak memiliki cukup7 informasi tentang[ kinerja dan kondisi perusahaan. Teori ini bertujuan’ untuk menjelaskan hubungan antara pemilik (*principal*) dan manajemen (*agent*). Teori agensi merupakan suatu kontrak yang terjadi antara satu atau lebih individu sebagai *principal* dan *individu* lainnya sebagai *agent* (Yunistiyani dan Tahar, 2017).

**Teori *Stakeholder***

Teori *stakeholder* menyatakan bahwa perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya tidak terlepas dari kepentingan pihak internal maupun pihak-pihak lain (Pangestika, 2017). Keberlangsungan perusahaan dalam jangka panjang tergantung pada keberhasilan manajemen dalam menjalin hubungan individu maupun kelompok. Perusahaan memiliki banyak pemangku kepentingan dalam pelaksanaan operasinya dan perusahaann bertanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingan tersebut. Pihak-pihak lain yang terkait seperti pemegang saham, karyawan, *supplier*, *kreditur*, dan masyarakat yang berhubungan secara langsung secara ekonomi dengan perusahaan. Teori ini menyatakan bahwa perusahaan wajib bertanggung jawab dan bermanfaat untuk para *stakeholder*, karena suatu perusahaan sangat tergantung oleh keputusan para *stakeholder* (Suprimarini dan Suprasto, 2017).

**Teori Legitimasi**

Teori legitimasi menyatakan bahwa, perusahaan memiliki kontrak dengan masyarakat (Fatoni dkk, 2016). Dalam teori legitimasiKperusahaan berupaya untuk.menyesuaikan kondisi dengan peraturan-peraturan yang berlaku dimasyarakat sehingga dapat diterima dilingkungan eksternal karena dalam teori legitimasiJ menyatakan bahwa suatu organisasi hanya bisa bertahan jika masyarakatO sekitar merasa bahwa organisasi beroperasi’J berdasarkan sistem nilai yang sepadan dengan sistem nilai yang dimiliki oleh masyarakat (Sari, 2013). Legitimasi perusahaan dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Oleh sebab itu perusahaan perlu mengembangkan program *Corporate Social Responsibility* (CSR), dengan adanya *Corporate Social Responsibility* (CSR) diharapkan akan memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat sehingga masyarakat/ sekitar tempat beroperasi dapat menerima keberadaan/ perusahaan dengan baik dan tidak. mempermasalahkanM keberadaan perusahaanN tersebut. Pengungkapan ini digunakan untuk melegitimasi aktivitas perusahaan di mata masyarakat, karena pengungkapan 14 CSR akan menunjukkan tingkat kepatuhan suatu perusahaan ( Branco dan Rodrigues, 2008 dalam Ervina, 2013).

***Corporate Social Responsibility***

*Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan strategi dari perusahaan atau organisasi untuk mengembangkan bisnisnya sesuai dengan cara mereka masing-masing dengan memperhatikan nilai etis, ramah dengan masyarakat sekitar dan bermanfaat untuk masyarakat dalam hal pengembangan

Tanggung jawab sosial perusahaan adalah kewajiban perusahaan dalam menaati peraturan pemerintah yang tercantum dalam undang-undang dan memberikan dampak positif terhadap masyarakat sekitar baik dari segi lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

***Corporate Governance***

Isu terkait *corporate governance* di Indonesia muncul akibat dari adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan pada tahun 1998. *Corporate Governance* diartikan sebagai suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan sebagai upaya menciptakan suatu nilai tambah bagi para pemangku kepentingan (*stakeholder*) secara berkesinambungan dalam jangka waktu yang panjang (Sabirin, 2016).

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) yang baik dan benar akan menjaga keseimbangan antara pencapaian tujuan ekonomi dan tujuan masyarakat serta mengawasi perusahaan dalam penggolaan yang buruk mengakibatkan perusahaan akan terkena masalah di aktivitas perusahaan.

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) (2006), setiap perusahaan harus memastikan bahwa prinsip *Good Corporate Governance* diterapkan pada semua aspek bisnis perusahaan. Prinsip *Good Corporate Governance* yaitu, transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), responsibilitas *(responsibility*), independensi (*independency*), kewajaran dan kesetaraan (*fairness*).

**Agresivitas Pajak**

Agresivitas pajak merupakan hasrat perusahaan untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan sehingga dapat meningkatkan kekayaan bersih perusahan (Nugraha,2015) Agresivitas pajak perusahan tampak pada tingkat pajak efektif yang kecil. Upaya yang dilakukan perusahan dalam meminimalkan pembayaran pajak adalah melalui perencanan pajak. Perencanaan pajak merupakan suatu aktivitas wajib pajak untuk meminimalisasikan beban pajaknya melalui pemanfaatan fasilitas pajak, penghematan pajak, dan penghindaran pajak yang sesuai dengan aturan perpajakan (Hermanto,2017).

Upaya perusahan dalam meminimalkan beban pajak dapat dilakukan secara legal maupun illegal. Perencanan pajak dapat dilakukan secara legal dengan mematuhi peraturan danketentuan perpajakan yang berlaku atau disebut dengan pemghindaran pajak (*tax advoinvce*). Namun dapat juga dilakukan dengan sengajan tidak mematuhi aturan yang berlaku atau disebut dengan penggelapan pajak (*tax evasion/tax sheltering*).

**Pengembangan Hipotesis**

**Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak**

Dalam menjalankan operasionalnya, perusahan berupaya memaksimalkan laba bersihnya dengan melakukan efesiensi biaya dan efektifitas kinerjanya,. Pajak merupakan salah satu bagian biaya perusahaan sehingga wajar jika perusahaan ingin memiliki pembayaran pajak yang sangat kecil. Namun, keberlangsungan perusahaan tidak hanya dapat dilihat pada aspek ekonomi saja, melainkan perusahaan mempertimbangkan aspek non ekonomi seperti, sosial, budaya, lingkungann, politik dan lainnya. Berdasarkan teori pemangku kepentingan, perusahaan merupakan entitas yang memperlihatkan seluruh pemagku kepentingannya seperti pemegang saham, masyarakat, pemerintah, kreditor, dll.

Penghindaran pajak merupakan tindakan yang tidak melanggar hukum, namun semakin agresief perusahan dalam penghindaran pajak maka akan menurunkan pendapatan utama negara sehingga akan berpengaruh pada terhambatnya pembangunan negara. Keagresifan perusahaan yang tinggi dalam meminimalkan beban pajaknya tidak sejalan dengan konsep penting *Corporate Social Responsibility* untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarkat. Perusahaan tidak hanya bertanggung jawab terhadap kesejahteraan perusahaan saja, namun harus memiliki tanggung jawab sosial lingkungan untuk menarik konsumen (Bani, 2015).

Diharapkan dengan semakin tingginya pengungkapan CSR yang diungkapkan oleh perusahaan, maka semakin kecil kemungkinan perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Lanis dan Richardson (2012) mengatakan bahwa komitmen perusahaan untuk melakukan kegiatan CSR berdampak negatif terhadap agresivitas pajak.

**H1: pengungkapan *Corporate Social Responsibility* berpengaruh Positif terhadap Agresivitas Pajak**

**Pengaruh Komposisi Dewan Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak**

Berdasarkan teori keagenan, konflik selalu muncul karena adanya perbedaan informasi yang dimiliki antara pemegang saham dan pengelolaan perusahan, yaitu manajer. Dewan komisaris Independen merupakan salah satu organ CGC yang digunakan untuk meminimalkan timbukanya konflik keagenan.

 Penelitian yang mendukung ialah Ardyansah dan Zulaikha (2014) bahwa semakin banyak komisaris independen akan berpengaruh pada ketatnya pelaporan jumlah pajak. Diantri dan Agung (2016) menambahkan komisaris independen akan meminimalisir kecurangan dalam pelaporan perpajakan

Dewan Komisaris Independen akan mengawasi kinerja dewan komisaris maupun direksi dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen dalam mengelola kegiatan operaional perusahaan. Pengawasan yang semakin ketat dapat mendorong manajemen untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas dan menjadikan laporan keuangan lebih obyektif. Hal ini berarti adanya dewan komisaris independen efektif dalam mencegah tindakan penghindaran pajak. Penelitian yang menunjukkan hubungan negatif antara dewan komisaris independen dengan penghindaran pajak antara lain penelitian yang dilakukan oleh Maharani dan Suardana (2014), Santoso dan Muid (2014), Diantari dan Ulupui (2016). Sehingga dapat disimpulkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

**H2: Dewan Komisaris Independen berpengaruh Negatif terhadap Agresivitas Pajak**

**Pengaruh Ukuran Dewan Direksi terhadap Agresivitas Pajak**

 Dewan Direksi memiliki andil dalam melakukan *Corporate Governance*, Fungsi dari dewan direksi adalah sebagai wakil dewan komisaris dalam tata kelola perusahaan. Dalam teori agensi disebutkan bahwa, untuk mengurangi potensi konflik kepentingan antara pihak-pihak yang terkait, maka diperlukan *Corporate Governance* yang baik. Semakin banyak proporsi dewan direksi dalam suatu perusahaan, maka akan semakin tinggi pula kompetensi yang terjadi untuk mencapai tata kelola perusahaan yang baik. Irawan dan Farahmita (2012) berpendapat dewan direksi dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak perusahaan. Irawan dan Farahmita (2012) membuktikan dalam penelitian mereka semakin besar total anggota dalam dewan direksi, tingkat kompetisi yang terjadi antar direksi akan meningkat sehingga timbul harapan tata kelola perusahaan akan menjadi lebih baik.

Dalam penelitian Putri dan Chariri (2017) menemukan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh Negatif terhadap Agresvitas Pajak.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis penelitian ini adalah ;

**H3: Ukuran Dewan Direksi berpengaruh Negatif terhadap Agresivitas Pajak**

**Pengaruh Komite Audit terhadap Agresivitas Pajak**

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan, yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris, yang bertugas untuk membantu melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan perusahaan. Tugas dari Komite Audit adalah membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja perusahaan.

Berdasarkan teori *agensi*, semakin tinggi keberadaan komite audit dalam perusahaan, maka pengawasan terhadap kegiatan perusahaan akan lebih baik dan konflik keagenan yang terjadi akibat keinginan manajemen untuk melakukan penghindaran pajak dapat diminimalisasi.

Penelitian yang dilakukan Diantari dan Ulupui (2016), menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini mengikuti Eksandy (2017) diukur dari jumlah komite audit dalam suatu perusahaan. Kementerian BUMN mewajibkan komite audit minimal terdiri dari seorang ketua yang juga komisaris independen dan dua anggota eksternal yang independen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

**H4: Komite Audit berpengaruh Negatif terhadap Agresivitas Pajak.**

**Kerangaka Pemikiran.**

***Corporate Social Responsibility***

***(X1)***

 **(H1) (+)**

 ***Agresivitas Pajak***

 **(Y)**

**Dewan Komisaris Independen**

 **(X2)**

 **(H2) (-)**

**Dewan Direksi**

**(X3)**

**(H3) (-)**

**Komite Audit**

**(X4)**

 **(H4) (-)**

*(Sumber: Data diolah, 2019)*

**METODE PENELITIAN**

**Jenis Penelitian**

Penelitian dalam skripsi ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang banyak menuntut penggunaan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya (Arikunto, 2013).

**Jenis Data dan Sumber Data**

Data-data yang digunakan dalam Penelitian ini merupakan data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber asli melainkan hasil dari publikasi Burs Efek Indonesia (BEI) yang berkaitan dengan penelitian, serta sumber data penelitian yaitu annual report dan laporan keuangan Industri Pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2018.

**Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model analisis regeresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda ini digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis statistik deskriptif dan uji asumsi klasik dilakukan sebelum melakukan analisis regresi linier berganda.

**Variabel-Variabel**

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah agresivitas pajak. Agresivitas pajak adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan dalam meminimalkan beban pajak yang dibayarkan, baik secara legal, ilegal, ataupun keduanya. Pada penelitian ini agresivitas pajak diukur dengan proksi *Effective Tax* *Rates* (ETR). ETR merupakan gambaran atas besarnya laba sebelum pajak untukmembayar beban pajak perusahaan, jika nilai ETR rendah maa dapat dipastikan bahwa perusahaan melakukan penghindaran pajak (Prayogo dan Darsono, 2015). Rumus yang digunakan untuk menghitung ETR seperti model penelitian yang dilakukan oleh Lanis dan Richardson (2012) sebagai berikut

 ETR= $Beban Pajak Penghasilan$

 *Pendapatan Sebelum Pajak*

***Corporate Social Responsibility***

CSR diproksikan ke dalam pengungkapan CSR yang dapat diukur menggunakan *Corporate Social Responsibility Disclosure Index* (CSRDIj) berdasarkan *Global Reporting Initiatives* (GRI). Pada umumnya perusahaan dalam menyusun laporan pengungkapan CSR menggunakan standar *sustainability* *report* yang dibuat oleh GRI dengan memfokuskan pada pengungkapan kinerjaekonomi, lingkungan dan sosial. Indikator pengungkapan informasi CSR memiliki total item pengungkapan sebanyak 91 (*Global Reporting Initiative*, 2018). Pengukuran ini dilakukan dengan cara mencocokkan aktivitas-aktivitas CSR yang diungkapkan pada laporan tahunan perusahaan dengan *check list*, apabila item y diungkapkan maka diberi nilai 1, jika tidak diungkapkan maka diberi nilai 0 pada *check list*.

**Dewan Komisaris Independen**

Menurut Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas, dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Dewan komisaris merupakan organ perusahaan yang bertanggung jawab dalam mengawasi dan memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *Corporate Governance* (Fahriani dan Priyadi, 2016).

Komisaris Independen = $komisaris independen$

 *Jumlah komisaris*

**Dewan Direksi**

Dewan direksi bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan dan strategi yang telah disetujui oleh dewan komisaris, pemeliharaan suatu struktur organisasai, dan memastikan bahwa pendelegasian wewenang berjalan secara efektif. Dewan Direksi juga berperan dalam meningkatkan hubungan dengan pihak luar Perusahaan. Dewan direksi bertugas dalam melakukan pengelolaan manajemen perusahaan agar lebih efektif dan efisien. Dalam penelitian ini menggunakan proksi yang digunakan pada penelitian Fahriani dan Priyadi (2016) sebagai berikut:

**Dewan Direksi = Jumlah Seluruh Dewan Direksi dalam Perusahaan**

**Komite Audit**

Dalam rangka meringankan tugas yang diemban dewan komisarismaka dibentuk suatu komite, yaitu Komite Audit. Komite Audit berperan dalam optimalisasi mekanisme pengawasan internal perusahaan. Komite Audit juga menjembatani hubungan antara auditor eksternal dengan perusahaan dan juga dewan komisaris dengan auditor internal.

Komite audit merupakan salah satu bentuk nyata dari penerapan*good corporate governance* atau tata kelola yang baik. Banyak para pihak, terutama dari pihak investor menganggap bahwa dengan adanya komite audit menjadi nilai tambah bagi sebuah perusahaan. Investor akan lebih merasa aman jika berinvestasi pada perusahaan yang telah menerapkan *good corporate governance*. Dalam penelitian ini menggunakan proksi yang digunakan pada penelitian Eksandy (2017); Fahriani dan Priyadi (2016) sebagai berikut:

 **Komite Audit = Jumlah Seluruh Komite Audit dalam Perusahaan**

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Uji Statistik**

Uji statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui nilai minimum, maksimum, mean (rata-rata) dan standar deviasi suatu data. Minimum merupakan nilai terkecil dalam suatu kelompok data. Maksimum merupakan nilai terbesar dari rangkaian suatu data. Mean merupakan rata-rata dalam rangkaian data penelitian.

Hasil Uji Statistik Deskriptif

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N | Range | Minimum  | Maximum  | Mean  | Std. deviation | Variance  |
| Corporate Social 42 1 0 1 .67 .477 .228Dewan Komisaris 42 17 .33 .50 .3737 .06179 .004Independen Dewan Direksi 42 5 3 8 5.45 1.347 1.815Komite Audit 42 2 3 5 3.05 .309 .095 Agresivitas Pajak 42 21.6016 -20.7847 .8168 -1.275035 4.2836293 18.349Valid N (listwise) 42 |

*Sumber: Data yang diolah, SPSS 24*

1. Dari IV.2 data yang diolah, diperoleh hasil rata-rata Dewan Komisaris Independen (DKI) sebesar 0.3737 (37%) dengan standard deviasi sebesar 0.061 (6.1%). Standard deviasi menunjukkan seberapa jauh sebuah nilai dalam suatu distribusi menyimpang dari rata-rata. Rasio tersebut menjelaskan rasio yang mampu menunjukkan keberhasilan komisaris independen dalam menjalankan fungsinya. Perusahaan yang memiliki Dewan Komisaris Independen paling tinggi dengan nilai maksimum sebesar 0.50 (50%) sedangkan perusahaan yang memiliki Dewan Komisaris Independen terendah adalah dengan nilai minimum sebesar 0.33 (33%).
2. Dewan Direksi mempunyai nilai rata-rata (mean) sebesar 5.45 dengan standard deviasi sebesar 1.347 (134.7%). Nilai minimum untuk variabel Dewan Direksi sebesar 3 (300%). Dan nilai maksimum variabel Dewan Direksi sebesar 8 (800%).
3. Komite Audit mempunyai nilai rata-rata (mean) sebesar 3.05 (305%) dengan standard deviasi sebesar 3.09 (309%). Nilai minimum untuk variabel ini sebesar 3 (300%). Sedangkan nilai maximum sebesar 5 (500%).
4. Variable CSR mempunyai nilai rata-rata (mean) sebesar 0.67 (67%) dengan standard deviasi sebesar 0.477 (47.7%). Nilai minimum untuk variabel ini sebesar 0 (0%). Sedangkan nilai maximum sebesar 1 (100%).
5. Variable Agresivitas Pajak mempunyai nilai rata-rata (mean) sebesar -1.27 (-127%) dengan standard deviasi sebesar 4.28 (428%). Nilai minimum untuk variabel ini sebesar -20.78 (-20.78%). Sedangkan nilai maximum sebesar 0.81 (81%).

**Uji Asumsi Klasik**

**Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah sebuah model regresi penelitian mempunyai distribusi data yang normal atau tidak. Sebuah model regresi yang baik adalah model regresi yang terdistribusi secara normal atau mendekati normal.

Hasil Uji Normalitas

|  |  |
| --- | --- |
|  | UndstanardizedResidual |
| NNormal MeanParameters Std. DevitionMost Extreme AbsoluteDifferences Positive NegativeTest StatisticAsymp. Sig (2-tailed)  | 42.00000004.18972208.334.253-,334,334.174 |

1. Test distribution is Normal
2. Calculated from data
3. Lilliefors Significance Correction

*Sumber: Data yang diolah, SPSS 24*

Berdasarkan Tabel IV.3 diatas menunjukan nilai Kolmogorov-Smirnov Z dengan nilai Asympotic Significance (2-tailed) sebesar 0,174 lebih besar dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa data residual pada penelitian ini terdistribusi secara normal.

**Uji Multikolinearitas**

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variable independen. Model regresi yang baik adalah model regresi yang tidak terjadi korelasi diantara variable independennya. Untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam sebuah model regresi dapat dilihat dari nilai tolerance dan nilai VIF (Variance Inflation Factor).

Hasil Uji Multikolinearitas

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Model  | UnstandardizedCoefficients | Standardized Coefficients | Collinearity statistics |
| B | Std. Error | Beta | Tolerance  | VIF |
|  1 (Constant) -1,609 8,212  Corporate Social 1,465 1,554 ,163 ,863 1,159 Dewan Komisaris Independen -9,959 12,360 -,144 ,813 1,230 Dewan Direksi ,204 ,532 ,064 ,923 1,084 Komite Audit ,645 2,279 ,046 ,959 1,042 |

1. Dependent Variable: Agresivitas Pajak

*Sumber: Data yang diolah, SPSS 24*

Hasil uji multikolonieritas yang disajikan pada Tabel 4.4 diatas menunjukan bahwa semua variable memiliki nilai tolerance < 0,10 dan nilai VIF > 10. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolonieritas diantara variable independen dalam model regresi.

**Uji Heteroskedastisitas**

Uji Heteroskadestisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidak samaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Menurut Ghozali, 2014:139 model regresi yang baik adalah model regresi yang homokadestistas atau tidak terjadi heteroskadestistas.

Hasil Uji Heteroskedastisitas



*Sumber: Data yang diolah, SPSS 24*

Dari grafik scatterplots yang terdapat di atas, terlihat bahwa titiktitik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulakan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

**Regresi Linear Berganda**

Analisis regresi linear berganda merupakan alat ukur mengenai pengaruh yang terjadi antara variable dependen (terikat) dengan dua atau lebih variable independen (bebas). Persamaan regresi dalam penelitian ini ialah:

 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Model  | UnstandardizedCoefficients | Standardized Coefficients |  |  |
| B | Std. Error | Beta | t  | Sig.  |
|  1 (Constant) -1,609 8,212 -,196 ,846  Corporate Social 1,465 1,554 ,163 ,943 ,352 Dewan Komisaris Independen -9,959 12,360 -,144 -,806 ,003 Dewan Direksi ,204 ,532 ,064 ,383 ,004 Komite Audit ,645 2,279 ,046 ,283 ,779 |

1. Dependent Variable: Agresivitas Pajak

*Sumber data oleh SPSS 24*

Analisis regresi linear berganda merupakan alat ukur mengenai pengaruh yang terjadi antara variable dependen (terikat) dengan dua atau lebih variable independen (bebas). Persamaan regresi dalam penelitian ini ialah:

Y = α + β1\*X1+ β2\*X2 + β3\*X3 + β4\*X4 +e

Y = -1,609+1,465 CSR+ -9.959 DKI + 0.204 DD + 0.645 KA+e

Dari hasil regresi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Konstanta sebesar -1.609 menyatakan bahwa jika variable independen dianggap konstan, maka variable dependen dianggap bernilai sama dengan konstantanya. Dengan kata lain jika Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi, Komite Audit, dan *Corporate Social Responsibility* bernilai 0, maka Agresivitas Pajak (AP) nilainya sebesar 1.609%.
2. Koefisien *Corporate Social Responsibility* sebesar 1,465 hal ini menunjukan bahwa setiap peningkatan 1% dari *Corporate Social Responsibility*, maka akan menaikkan agresivitas pajak perusahaan sebesar 146,5%. Namun dalam penelitian ini tidak ada signifikansinya, maka hal ini dapat diindikasikan bahwa ada atau tidaknya *Corporate Social Responsibility*, maka tidak ada hubungannya dengan kemampuan perusahaan dalam meningkatkan Agresivitas Pajak (AP).
3. Koefisien Dewan Komisaris Independen sebesar -9.959, hal ini menunjukan bahwa setiap peningkatan 1% dari Dewan Komisaris Independen, maka akan menurunkan agresivitas pajak perusahaan sebesar 995.9%. Hal ini dapat diindikasikan bahwa semakin tinggi Dewan Komisaris Independen, maka kemampuan perusahaan dalam memberikan agresivitas pajak (AP) akan turun.
4. Koefisien Dewan Direksi sebesar 0,204 hal ini menunjukan bahwa setiap peningkatan 1% dari DD, maka akan menaikkan Agresivitas Pajak (AP) sebesar 20.4 %. Hal ini dapat diindikasikan bahwa semakin tinggi jumlah DD, maka kemampuan perusahaan dalam meningkatkan Agresivitas Pajak (AP) akan naik.
5. Koefisien Komite Audit sebesar 0,645 hal ini menunjukan bahwa setiap peningkatan 1% dari Komite Audit, maka akan menaikkan Agresivitas Pajak (AP) perusahaan sebesar 64.5%. Namun dalam penelitian ini tidak ada signifikansinya, maka hal ini dapat diindikasikan bahwa semakin tinggi Komite Audit, maka tidak ada hubungannya dengan kemampuan perusahaan dalam meningkatkan Agresivitas Pajak (AP).

**Uji Hipotesis**

**Uji t**

Uji statistik pada dasarnya menunjukan seberapa jauh pengaruh satu variable penjelas (independen) secara individual dalam menerangkan variable dependen. Hasil uji t adalah sebagai berikut:

 Hasil Uji t (Parsial)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Model  | UnstandardizedCoefficients | Standardized Coefficients |  |  |
| B | Std. Error | Beta | t  | Sig.  |
|  1 (Constant) -1,609 8,212 -,196 ,846  Corporate Social 1,465 1,554 ,163 ,943 ,352 Dewan Komisaris Independen -9,959 12,360 -,144 -,806 ,003 Dewan Direksi ,204 ,532 ,064 ,383 ,004 Komite Audit ,645 2,279 ,046 ,283 ,779 |

* + - * 1. Dependent Variable: Agresivitas Pajak

*Sumber: Data yang diolah*

Berdasarkan hasil uji t pada diatas, disimpulkan bahwa:

a. Variabel X1, CSR memiliki nilai probabilitas signifikan sebesar 0,352. Hal ini menunjukan bahwa probabilitas signifikansi lebih besar dari taraf signifikansi α = 0,05 (0,352 > 0,05). Hal ini menunjukan bahwa H1 ditolak, yang berarti bahwa secara parsial variable CSR tidak memiliki pengaruh terhadap Agresivitas Pajak.

b. Variabel X2, Dewan Komisaris Indepenen (DKI) memiliki nilai probabilitas signifikansi 0,003. Hal ini menunjukkan probabilitas signifikansi lebih kecil dari taraf signifikansi α = 0,05 (0,003 < 0,05). Maka hal ini menunjukan H2 diterima, yang berarti bahwa secara parsial variable Dewan Komisaris Independen (DKI) memiliki pengaruh terhadap Agresivitas Pajak.

c. Variable X3, Dewan Direksi memiliki nilai probabilitas signifikansi 0,004. Hal ini menunjukkan bahwa probabilitas signifikansi lebih kecil dari taraf signifikansi α = 0,05 (0,004 < 0,05). Maka hal ini menunjukan bahwa H3 diterima, yang berarti bahwa variable Dewan Direksi memiliki pengaruh terhadap Agresivitas Pajak.

d. Variabel X4, Komite Audit memiliki nilai probabilitas signifikan sebesar 0,779. Hal ini menunjukan bahwa probabilitas signifikansi lebih besar dari taraf signifikansi α = 0,05 (0,779 > 0,05). Hal ini menunjukan bahwa H4 ditolak, yang berarti bahwa secara parsial variable Komite Audit tidak memiliki pengaruh terhadap Agresivitas Pajak.

**Pengaruh CSR terhadap terhadap Agresivitas Pajak**

Hasil pengujian hipotesis pertama (H1) menunjukkan bahwa variabel *Corporate Sosial Responsibility* memiliki pengaruh terhadap tindakan pajak agresif. Jadi hipotesis yang menyatakan proporsi *Corporate Sosial Responsibility* berpengaruh positif terhadap tindakan pajak agresif diterima. Namun dalam penelitian ini, variabel *Corporate Sosial Responsibility* tidak memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Hal ini berarti bahwa semakin luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility* akan menurunkan Agresivitas Pajak. Hal ini mendukung penelitian Rohmati (2013) yang menyatakan bahwa informasi *Corporate Sosial Responsibiliy* yang diungkapkan dalam laporan, belum tentu sesuai dengan kondisi sebenarnya. Sehingga tingkat pengungkapan kegiatan tanggung jawab sosial dalam laporan tahunan perusahaan tidak bisa dijadikan jaminan akan rendahnya tindakan pajak agresif yang dilakukan oleh perusahaan.

**Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak**

Berdasarkan hasil analisis uji variable Dewan Komisaris Independen menunjukan bahwa probabilitas signifikansi sebesar 0,003. Hal ini menunjukkan bahwa probabilitas signifikansi lebih kecil dari taraf signifikansi lebih besar α = 0,05 atau 5% (0,003 < 0,05). Sehingga H2 diterima. Hal ini berari bahwa variable Dewan Komisaris Independen secara parsial memiliki pengaruh terhadap Agresivitas Pajak.

Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi atau rendahnya Dewan Komisaris Independen perusahaan maka akan berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. Secara teori tingginya Dewan Komisaris Independen maka menunjukkan bahwa perusahaan sedang menjalani kontrol yang ketat untuk memenuhi segala kebutuhan yang ada dalam perusahaan sehingga masih menghasilkan keuntungan, dengan tingkat keuntungan yang tinggi maka pajak yang dihasilkan juga meningkat. Banyaknya Dewan Komisaris Independen menunjukkan bahwa perusaahaan tersebut semakin ketat dalam hal keuangan sehingga perusahaan tidak akan melakukan penghindaran pajak dan lebih agresif dalam penerapan pajak. komposisi dewan komisaris independen adalah 50 % dari jumlah anggota dewan komisaris. Status independensi dewan komisaris independen adalah untuk menghindari konfik kepentingan Hal tersebut dapat menarik investor untuk menanamkan saham pada perusahaan sehingga dapat meningkatkan permintaan investor terhadap saham perusahaan.

**Pengaruh Dewan Direksi terhadap Agresivitas Pajak**

Hasil pengujian hipotesis ketiga (H3) menunjukkan bahwa variabel proporsi dewan direksi memiliki pengaruh terhadap tindakan pajak agresif. Jadi hipotesis yang menyatakan proporsi dewan direksi berpengaruh positif terhadap tindakan pajak agresif diterima. Direksi diasumsikan sebagai pihak perwakilan dari perusahaan yang menginginkan keuntungan tinggi dengan pajak rendah, namun jika dikaitkan dengan pemerintah akan memiliki hubungan bertolak belakang antara keduanya. Maka adanya benturan kepentingan (*agency theory*) akan sangat rentan terjadi antara perusahaan dan pemerintah. Perusahaan mempunyai kepentingan menaikkan laba sebagai acuan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan, sedangkan pemerintah melihat kenaikan laba sebagai objek pajak yang akan ditagihkan. Benturan kepentingan ini menyebabkan timbulnya tindakan pajak agresif.

Kepemilikan saham Perseoran diatas 5% di dominasi oleh para steakholder yang menjabat sebagai dewan direksi di perusahaan tersebut sehingga dengan semakin besar kekuatan yang secara penuh mengontrol keputusan perusahaan dan secara langsung terlibat dalam pengelolaan perusahaan, semakin besar proporsi kepemilikan yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali, maka makin besar pengaruh yang dimilikinya dalam pengendalian pajak agresif.

**Pengaruh Komite Audit terhadap Agresivitas Pajak**

Hasil pengujian hipotesis ketiga (H4) menunjukkan bahwa variabel ukuran komite audit memiliki pengaruh terhadap tindakan pajak agresif. Jadi hipotesis yang menyatakan bahwa ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap tindakan pajak agresif diterima. Namun dalam penelitian ini, Komite Audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pajak agresif. Dalam penelitian ini variabel komite audit menggunakan proksi jumlah komite audit dalam perusahaan. Sesuai hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa sedikit atau banyaknya anggota komite audit tidak mempengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan (Puspita, 2014).

 Hal ini dimungkinkan bahwa kecenderungan perusahaan melakukan praktek pajak agresif bukan dari jumlah dari komite audit melainkan dilihat dari kualitas dan independensi komite audit itu sendiri untuk menganalisis apakah perusahaan melakukan penghindaran pajak. Dapat disimpulkan, pada kenyataannya peran komite audit belum efektif dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan pajak perusaan di Indonesia. Hasil penelitian ini, rata-rata perusahaan memiliki 3 atau 4 orang komite audit. Menurut peraturan yang dikeluarkan oleh BAPEPAM yaitu komite audit minimal berjumlah 3 orang (dengan diketuai oleh seorang dewan komisaris independen yang menjabat sebagai ketua komite audit). Berarti sampel dalam penelitian ini sudah mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh BAPEPAM mengenai jumlah komite audit. Hal inilah yang menjadikan tanda tanya dalam hal ketidakberadaannya pengaruh jumlah komite audit terhadap tindakan pajak agresif perusahaan..

**KESIMPULAN DAN SARAN**

**Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis statistik yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Corporate Social Responsibility* tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.
2. Dewan Komisaris Independen berpengaruh Positif terhadap Agresivitas Pajak.
3. Dewan Direksi berpengaruh Positif terhadap Agresivitas Pajak.
4. Komite Audit tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.

**Saran**

Saran yang diajukan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel yang digunakan selain keempat variabel diatas seperti kepemilikan konsitusional dan kepemilikan manejerial.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan jumlah periode dan menggunakan sampel yang lebih banyak agar hasil pengujiannya bisa lebih akurat.

**DAFTAR PUSTAKA**

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2018. “*Good Corporate*

*Governance*.” Diakses 11 November 2019

<http://www.bpkp.go.id/dan/konten/299/Good-Corporate.bpkp>

Dewi Kusuma Wardani, Ratna Monica Pricillia (2019) “Effect Of Corporate Social Responsibility (CSR) Profitability, and Profit Management On Tax Evasion. “ *Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi.* Vol 14, No 1

Eksandy, Arry. 2017. “Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance).” *Competitive Journal* 1 (1): 1-20.

Fadhilah, Rahmi. 2014. “Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance.” *E-Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang*: 1-22.

Filicia,Raisa Pratiwi (2019). ” Pengaruh Corporate Social Responsibility, Struktur

Kepemilikan Asing dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. ” *Jurnal Akuntansi STIE Multi Data Palembang*. 1-15

Global Reporting Initiative. 2018. “G4 Sustainability Reporting Guidelines.” Diakses 08 November <https://www.globalreporting.org/information/g4/Pages/default.aspx>.

Hadi, J., & Mangoting, Y. (2014). Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Karakteristik Dewan Terhadap Agresivitas Pajak. *Tax and Accounting Review*, Vol. 4.

Jessica dan Agus, Arianto, Toly. (2014). Pengaruh PengungkapanCorporate Social Responsibility Terhadap agresivitas Pajak. *Tax & Accounting Review*, Vol. 4, No.1

Juniati Gunawan (2017) “Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Corporate Governance Terhadap Agresivitas Pajak. “ *Jurnal Akuntansi Universitas Tarumanegara*. Vol 21, No 3

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2018a. “Memahami APBN 2018.”Diakses 05 Oktober 2019 <http://www.kemenkeu.go.id/dataapbn>.

Lanis, R. and G. Richardson. (2012). Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: An Empirical Analysis. *J.Account. Public Policy*, pp.86

Lanis, Roman., dan Grant Richardson. 2012. “Corporate Social Responsibility and

Tax Aggressiveness: A Test of Legitimacy Theory.” *Accounting, Auditing,& Accountability Journal* 26 (1): 75-100.

Lanis, Roman., dan Grant Richardson. 2011. “Corporate Social Responsibility and

Tax Aggressiveness.” *SSRN Electronic Journal*: 1-50.

Mahulae, Pratomo, Nurbaiti, (2016). “Pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan komite audit terhadap tax avoidance pada subsector otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2010-2014. “ *Jurnal Akuntansi Universitas Telkom*. Vol 3

Maria Yulia Dwi Rengganis, I.G.A.M Asri Dwija Putri (2018) “Pengaruh Corporate Governance dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak. “ *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas*  *Udayana* Vol 24, No 2

Nugraha, Novia Bani., dan Wahyu Meiranto. 2015. “Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak.” Diponegoro Journal of Accounting 4 (4): 1-14.

Pangestika, Nurul Amalia. 2017. “Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Responsibility, Kualitas Audit, dan Kepemilikan Institusional Pada Agresivitas Pajak.” E-*Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 19 (2): 1349- 1377.

Permana, Ahmad Reza Dwi. 2015. “Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak.” *Skripsi*, Universitas Diponegoro

Yunistiyani dan Tahar, (2017) “Tanggung jawab sosial perusahaan dan evaluasi keuangan terhadap agresivitas pajak dengan tata kelola perusahaan yang baik sebagai variabel pemoderasi. “ *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*. [Vol 2, No 1 (2017)](https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JIA/issue/view/625)

Suprimarini, Ni Putu Deiya., dan Bambang Suprasto. 2017. “Pengaruh Corporate Social Agresivitas Pajak.” *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia

Surya, Indra & Yustiavandana, Ivan. 2008. Penerapan Good Corporate Governance (Mengesampingkan Hak-hak Istimewa demi Kelangsungan Usaha), Jakarta: KENCANA

The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG). 2012. Good Corporate Governance.